

## BAB 6

### KESIMPULAN

#### 6.1 Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa kerja sama pertahanan Indonesia–Turki dalam pengembangan alutsista *warship* merupakan kebijakan strategis yang diambil secara rasional oleh kedua negara sebagai respons terhadap dinamika ancaman maritim dan keterbatasan kapabilitas pertahanan masing-masing pada periode 2019–2024. Kerja sama ini menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pengamanan pertahanan maritim Indonesia, khususnya dalam menghadapi ancaman non-tradisional, aktivitas lintas negara, serta tantangan geopolitik di wilayah perairan strategis.

Melalui perspektif Rational Choice Theory, keputusan Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan Turki dapat dipahami sebagai pilihan rasional yang didasarkan pada pertimbangan biaya dan manfaat. Indonesia menilai bahwa kerja sama pengembangan *warship* dengan skema Transfer of Technology (ToT) memberikan manfaat strategis yang lebih besar dibandingkan alternatif kebijakan lainnya, seperti ketergantungan penuh pada impor alutsista atau kerja sama yang sarat dengan hambatan politik. Kerja sama ini dipandang mampu meningkatkan kapabilitas pertahanan maritim sekaligus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional dalam jangka panjang.

Sejalan dengan itu, dari sudut pandang Turki, kerja sama dengan Indonesia juga merupakan pilihan rasional untuk memaksimalkan kepentingan nasionalnya. Turki memanfaatkan kerja sama ini untuk memperluas pasar industri pertahanan, meningkatkan daya saing produk alutsistanya, serta memperkuat pengaruh diplomasi pertahanan di kawasan Indo-Pasifik. Dengan demikian, interaksi kedua negara mencerminkan tindakan rasional aktor negara yang sama-sama berupaya mengoptimalkan keuntungan strategis di bawah keterbatasan dan peluang yang ada.

Analisis menggunakan Rational Actor Model memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa kebijakan kerja sama pertahanan Indonesia–Turki merupakan hasil kalkulasi strategis negara sebagai aktor tunggal yang mempertimbangkan tujuan nasional, alternatif kebijakan, serta konsekuensi dari

setiap pilihan. Sementara itu, penerapan konsep kerja sama internasional Andrew Hurrell menunjukkan bahwa kerja sama ini didorong oleh interdependensi dan kepentingan bersama, keseimbangan kekuatan, institusionalisasi, serta faktor domestik dan kebijakan nasional kedua negara.

Meskipun memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan pertahanan maritim Indonesia, kerja sama ini masih menghadapi tantangan dalam implementasinya, terutama terkait koordinasi antar lembaga, keberlanjutan komitmen politik, serta optimalisasi transfer teknologi. Oleh karena itu, keberhasilan kerja sama Indonesia–Turki dalam pengembangan alutsista *warship* sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, penguatan institusi, dan komitmen jangka panjang dari kedua negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kerja sama pertahanan Indonesia–Turki dalam pengembangan alutsista *warship* merupakan hasil dari pilihan rasional yang saling menguntungkan dan berperan strategis dalam upaya pengamanan pertahanan maritim Indonesia, sekaligus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional dan posisi Indonesia dalam diplomasi pertahanan internasional.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis mengenai upaya pengamanan pertahanan maritim Indonesia dengan kerja sama Indonesia dengan Turki dalam pengembangan alutsista *warship* tahun 2019 - 2024, berikut saran peneliti yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk pemangku kepentingan, pembuat kebijakan, dan peneliti selanjutnya

### **6.2.1 Saran Praktis**

Akselerasi penguasaan teknologi Kementerian Pertahanan dan BUMN/BUMS disarankan untuk lebih fokus pada penguasaan sistem elektronik dan sensor seperti radar dan *Combat Management System* dari Turki. Pemerintah perlu menyederhanakan birokrasi dalam proses *Transfer of Technology* agar industri swasta lokal dapat lebih mudah terlibat sebagai sub-kontraktor bagi PT PAL dalam proyek-proyek bersama Turki. Indonesia harus terus menggunakan kerja sama pertahanan ini sebagai daya tawar dalam forum regional seperti ASEAN untuk menunjukkan bahwa keamanan

kawasan dapat dijaga melalui kemitraan antar-negara kekuatan menengah tanpa campur tangan berlebih dari kekuatan hegemon.

### **6.2.2 Saran Teoritis**

Untuk peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih dalam bagaimana konsep *Middle Power* dalam Hubungan Internasional tidak hanya ditentukan oleh kapabilitas ekonomi, tetapi juga oleh kemandirian teknologi pertahanan sebagai alat diplomasi. kemudian, disarankan adanya penelitian perbandingan antara model transfer teknologi Turki dengan negara lain untuk melihat model mana yang memberikan dampak paling signifikan bagi kemandirian industri pertahanan Indonesia dalam jangka panjang. Peneliti berikutnya juga dapat memfokuskan studi pada efektivitas penggunaan kapal perang hasil kerja sama Turki dalam operasi nyata, seperti pengejaran kapal ilegal di Natuna untuk mendapatkan data empiris mengenai performa alutsista tersebut di lapangan.